

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2013 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 6.080.094.677 atau mencapai 90,03 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 6.478.911.790,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 457.000,00 investasi jangka panjang sebesar Rp. 0, aset tetap sebesar Rp. 6.330.599.790,00 dana cadangan Rp. 0 dan aset lainnya sebesar Rp 147.855.000,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 6.478.911.790,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 457.000,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 6.478.454.790, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Tahun 2010 Nomor 123) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
18. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 38/A) .

1.3. Usur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN
TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah di bidang pengeluaran, Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2013, **SKPD Badan Kepegawaian Daerah** Kabupaten Blitar mempunyai 7 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- g. Program Pengembangan Data/Informasi Pegawai ;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 secara keseluruhan sebesar **Rp 6.752.773.425,00** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	6.564.113.227,00
2	Belanja Modal	188.660.198,00
	JUMLAH	6.752.773.425,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- <i>Pendapatan Asli Daerah</i>	0,00	0,00	0,00
2	Belanja			
	- <i>Belanja Operasi</i>	6.564.113.227,00	5.895.895.677,00	89,82
	- <i>Belanja Modal</i>	188.660.198,00	184.199.000,00	97,63
	JUMLAH	6.752.773.425,00	6.080.094.677,00	90,03

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2013 sebesar **Rp 6.080.094.677,00** atau **90,03** persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.672.678.748,00 atau 9,97 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	2.202.773.900	2.170.277.869,00	98,52
2	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	265.581.726	241.662.977,00	90,99
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.945.000	166.248.000,00	93,43
4	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	56.102.500	55.278.368,00	98,53
5	Pemindahan Tugas PNS	13.025.000	7.275.000,00	55,85
6	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	41.345.000	35.794.900,00	86,58
7	Diklat Dasar Pajak Bumi Bangunan	127.686.000	120.540.000,00	94,40
8	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah/Pengiriman Diklatpim II	327.385.000	327.310.000,00	99,98
9	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsi bagi PNS daerah	119.352.751	95.850.433,00	80,31
10	Ujian dinas	36.057.500	31.693.713,00	87,90
11	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	56.162.000	56.001.898,00	99,71
12	Ujian Penyesuaian Ijasah	38.576.000	31.918.759,00	82,74
13	Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Kerja Pegawai BKD Kabupaten Blitar	149.802.100	128.025.000,00	85,46
14	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.745.750	6.145.750,00	79,34
15	Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS	168.470.000	116.288.360,00	69,03
16	Seleksi Penerimaan Calon PNS	69.785.000	19.668.450,00	28,18
17	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	172.745.000	150.335.582,00	87,03
18	Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS	37.142.500	27.619.198,00	74,36

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
19	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	101.275.000	84.335.360,00	83,27
20	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	44.600.000	33.093.250,00	74,20
21	Penyelenggaraan Diklat teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1.669.275.000	1.585.381.844,00	94,97
22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.407.500	7.352.500,00	87,45
23	Pemrosesan Penenganan LP2P	22.462.500	20.961.000,00	93,32
24	Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Bapertarum dan Konversi NIP	31.838.000	20.799.000,00	65,33
25	Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS	23.195.000	21.707.500,00	93,59
26	Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	18.670.000	16.833.036,00	90,16
27	Pembinaan PNS Daerah	41.367.500	30.965.000,00	74,85
28	Penyusunan Evaluasi Jabatan, Informasi Faktor dan Database Kepegawaian	152.400.000	146.175.000,00	95,92
29	Seleksi dan Pengalihan Status GTT/PTT	447.842.500	206.890.670,00	46,20
30	Penyusunan Formasi/bezeting kekuatan Pegawai	8.347.500	7.716.260,00	92,44
31	Penyusunan Produk Data Kepegawaian	13.300.000	10.450.000,00	78,57
32	Pembuatan Profil BKD berbentuk Multimedia dan Penyusunan SOP dan SPP BKD Kab. Blitar	102.110.198	99.500.000,00	97,44
	TOTAL	6.752.773.425	6.080.094.677	90,03

Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.
4. Koordinasi dan sinkronisasi Badan Kepegawaian Daerah dengan instansi dalam dan luar daerah kurang optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

		31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
a. Aset		6.478.911.790,00	5.912.947.200,00
	Saldo Aset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 6.478.911.790,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(1)	Aset Lancar	457.000,00	498.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	6.330.599.790,00	5.862.894.200,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	147.855.000,00	49.555.000,00
Jumlah Aset		6.478.911.790,00	5.912.947.200,00

		31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1) Aset Lancar		457.000,00	498.000,00
	Saldo Aset Lancar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar 457.000,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	457.000,00	498.000,00
Jumlah		457.000,00	498.000,00

		31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
(a) Kas		0,00	0,00

Saldo Kas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(a) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(c) Persediaan	457.000,00	498.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2013 sebesar Rp 457.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	430.000,00
(2)	Materai	27.000,00
	Jumlah	457.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
3) Aset Tetap	6.330.599.790,00	5.862.894.200,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar **Rp 5.862.894.200,00** dan per 31 Desember 2013 sebesar **Rp 6.330.599.790,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012(Rp)
(a)	Tanah	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	1.891.686.790,00	1.423.981.200,00
(c)	Gedung dan Bangunan	437.513.000,00	437.513.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		6.330.599.790,00	5.862.894.200,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 467.705.590,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp 6.330.599.790,00 - Rp 5.862.894.200,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(a) Tanah	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00

Saldo Tanah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.001.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Tanah Kantor	Rp. 4.001.400.000,00
Jumlah	Rp. 4.001.400.000,00
Penambahan	
Tanah Kantor	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penyesuaian/Koreksi	
Tanah Kantor	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penghapusan/Pengurangan	
Tanah Kantor	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. (0,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp (0,00)
Saldo akhir	Rp 4.001.400.000,00

- ❖ Penambahan Aset Tanah tahun 2013 sebesar Rp0,00
- ❖ Belanja Modal sebesar Rp0,00;
- ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Kedua belanja tersebut merupakan atribusi yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

- Penyesuaian sebesar Rp0,00
 - ❖ Pengurangan Aset Tanah tahun 2013 sebesar Rp 0,00
 - Aset yang dihibahkan sebesar Rp0,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	1.891.686.790,00	1.423.981.200,00

Saldo peralatan dan mesin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.891.686.790,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	115.928.000,00
Peralatan Kantor	Rp.	14.689.000,00
Perlengkapan Kantor	Rp.	31.440.000,00
Komputer	Rp.	1.169.961.200,00
Meubelair	Rp.	25.475.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp.	118.000,00
Alat-alat Studio	Rp.	66.090.000,00
Alat-alat Komunikasi	Rp.	280.000,00
Jumlah	Rp.	1.423.981.200,00
Penambahan		
Peralatan Kantor	Rp.	14.135.000,00
Komputer	Rp.	65.274.000,00
Alat-alat Studio	Rp.	6.490.000,00
Jumlah	Rp.	85.899.000,00
Mencatat Pergeseran Aset		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	381.806.590,00
Peralatan Kantor	Rp.	0,00
Perlengkapan Kantor	Rp.	0,00
Komputer	Rp.	0,00
Meubelair	Rp.	0,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp.	0,00
Alat-alat Studio	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	381.806.590,00
Penghapusan/Pengurangan		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	(0,00)
Peralatan Kantor	Rp.	(0,00)
Perlengkapan Kantor	Rp.	(0,00)
Komputer	Rp.	(0,00)
Meubelair	Rp.	(0,00)
Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp.	(0,00)
Alat-alat Studio	Rp.	(0,00)
Jumlah	Rp	(0,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	(0,00)
Saldo akhir	Rp	1.891.686.790,00

- Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp **467.705.590,00** berasal dari:
 - ❖ Belanja Modal sebesar Rp **85.899.000,00**;

- ❖ Mencatat Pergeseran Aset berupa 4 unit sepeda motor terdiri dari 2 unit sepeda motor Tahun perolehan 2006 dengan harga @ Rp 9.850.000,00 berdasarkan berita acara serah terima nomor 028/150/409.017/2013 dan nomor 028/148/409.017/2013 ; 1 unit sepeda motor Tahun perolehan 2008 dengan harga Rp 11.800.000,00 berdasarkan berita acara serah terima nomor 028/150/409.017/2013 ; 1 unit sepeda motor Tahun perolehan 2010 dengan harga perolehan Rp 10.906.590,00 berdasarkan berita acara serah terima nomor 028/146/409.017/2013 dan 1 unit minibus/station wagon Tahun perolehan 2000 dengan harga Rp 60.250.000,00 berdasarkan berita acara serah terima nomor 028/147/409.017/2013 ; 1 unit minibus/station wagon Tahun perolehan 2001 dengan harga Rp 99.750.000,00 berdasarkan berita acara serah terima nomor 028/145/409.017/2013 ; dan 1 unit minibus/station wagon Tahun perolehan 2008 dengan harga Rp 179.400.000,00 berdasarkan berita acara serah terima nomor 028/149/409.017/2013 total Rp. 381.806.590,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	437.513.000,00	437.513.000,00

Saldo gedung dan bangunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 437.513.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Gedung Kantor		Rp. 437.513.000,00
Jumlah		Rp 437.513.000,00
Penambahan		
Gedung Kantor		Rp. 0,00
Jumlah		Rp 0,00
Penyesuaian/Koreksi		
Gedung Kantor		Rp. 0,00
Jumlah		Rp 0,00
Penghapusan/Pengurangan		
Gedung Kantor		Rp. (0,00)
Jumlah		Rp (0,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>		Rp 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>		Rp (0,00)
Saldo akhir		Rp 437.513.000,00

- Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp0,00 berasal dari:
 - ❖ Belanja Modal sebesar Rp00,00;
 - ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Kedua belanja tersebut merupakan atribusi yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap Gedung dan Bangunan;

- Reklasifikasi sebesar Rp0,00
- Penyesuaian sebesar Rp0,00
- Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun 2012 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00

- Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2012 sebesar Rp0,00 berasal dari Belanja Modal sebesar Rp0,00, Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa merupakan atribusi untuk memperoleh Aset tersebut;
- Reklasifikasi sebesar Rp0,00
- Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2012 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

- Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2013 sebesar Rp0,00 berasal dari:
 - ❖ Belanja Modal sebesar Rp0,00;
 - ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp0,00;
 - ❖ Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00;
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2013 sebesar Rp0,00 dan dihibahkan sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	147.855.000,00	0,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 49.555.000,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp **147.855.000,00** .

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 98.300.000 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp 147.855.000,00-Rp 49.555.000) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	147.855.000,00	49.555.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp 147.855.000,00

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp 98.300.000,00 tersebut perolehan dari pengadaan pekerjaan software simpeg berbasis web.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00, terdiri dari *(Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp0.*

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
c. Ekuitas Dana	457.000,00	498.000,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 sebesar Rp 457.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	457.000,00	498.000,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 457.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	457.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		457.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	6.478.454.790,00	5.912.449.200,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 6.478.454.790,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.330.599.790,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	147.855.000,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		6.478.911.790,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

(b) **PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
b. Belanja	6.080.094.677,00	5.564.661.053,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2013 sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
1) Belanja Operasi	5.895.895.677,00	5.486.441.053,00

Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2013 Rp 5.895.895.677,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(a)	Belanja Pegawai	2.899.708.900,00	2.763.727.869,00	2.166.280.097,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	3.664.404.327,00	3.132.167.808,00	3.320.160.956,00
Jumlah		6.564.113.227,00	5.895.895.677,00	5.486.441.053,00

Selanjutnya Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar realisasi tahun 2013 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Belanja Tidak Langsung	2.202.773.900,00	2.170.277.869,00	1.755.635.097,00
	Belanja Pegawai	2.202.773.900,00	2.170.277.869,00	1.755.635.097,00
	Gaji dan Tunjangan	2.100.173.900,00	2.099.732.869,00	1.679.885.097,00
	Tambahan Penghasilan PNS	102.600.000,00	70.545.000,00	75.750.000,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	2.202.773.900,00	2.170.277.869,00	1.755.635.097,00
	Belanja Langsung	4.549.999.525,00	3.909.816.808,00	3.809.025,00
	Belanja Pegawai	696.935.000,00	593.450.000,00	410.645.000,00
	Honorarium PNS	365.985.000,00	280.370.000,00	182.705.000,00
	Honorarium Non PNS	330.950.000,00	313.080.000,00	227.940.000,00
	Belanja Barang/Jasa	3.664.404.327,00	3.132.167.808,00	2.511.666.568,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	148.675.804,00	129.329.910,00	85.644.230,00
	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	46.629.900,00
	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	30.181.307,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	30.839.802,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	152.957.625,00
	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang /Parkir	0,00	0,00	407.936.600,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	56.100.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	16.165.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	561.180.000,00	502.677.000,00	359.133.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.068.807.500,00	896.971.855,00	579.210.492,00

	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	398.465.251,00	365.250.000,00	1.396.150.000,00
	Belanja Pemeliharaan	36.780.000,00	33.645.000,00	24.583.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi	275.300.000,00	271.325.000,00	132.450.000,00
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	2.179.500,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	4.549.999.525,00	3.909.816.808,00	3.809.025.956,00
	Jumlah 1 dan 2	6.752.773.425,00	6.080.094.677,00	5.564.661.053,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Belanja Modal	184.199.000,00	78.220.000,00

Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar meliputi Belanja Peralatan dan Mesin dengan realisasi tahun 2013 Rp. 85.899.000,00 dan Belanja Pengadaan Software dengan realisasi tahun 2013 Rp. 98.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			
	Belanja Modal Pengadaan peralatan Kantor			5.995.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	15.000.000,00	14.135.000,00	0,00
	Jumlah 2	0,00	14.135.000,00	5.995.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
3.	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.000.000,00	24.750.000,00	22.670.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop	40.000.000,00	38.544.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	1.980.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Software	100.160.198,00	98.300.000,00	49.555.000,00
	Jumlah 3	167.160.198,00	163.574.000,00	72.225.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio			
	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.500.000,00	6.490.000,00	0,00
	Total Belanja Modal	188.660.198,00	184.199.000,00	78.220.000,00

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp 85.899.000,00 dan Belanja Aset Tidak berwujud sebesar Rp 98.300.000,00*);

Blitar, Januari 2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blitar

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19620810 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 Jalan WR. Supratman no 13 Telp. (0342) 806135 , Fax (0342) 808478
 Email bkd @ blitar kab.go.id

BLITAR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Duabelas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
 NIP : 19620810 199203 1 009
 Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : RETNA SULISTYO K, S.AB
 NIP : 19790803 200212 2 001
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/109/409.012/KPTS/2012 tanggal 13 Januari 2012 ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
 Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

- | | |
|---|--------|
| a. Uang kertas | : Rp.0 |
| b. Uang logam | : Rp.0 |
| c. SP2D/ alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan | : Rp.0 |
| d. Saldo Bank | : Rp.0 |
| e. Surat Berharga lain | : Rp.0 |
| Jumlah | : Rp.0 |
| Saldo menurut buku | : Rp.0 |
| Perbedaan Positif/Negatif | : Rp.0 |
| Perbedaan karena : | |

Yang diperiksa,
 Bendahara Pengeluaran

Blitar, 31 Desember 2012
 Yang memeriksa,
 Pengguna Anggaran

RETNA SULISTYO K, S.AB
 Penata Muda
 NIP.19790803 200212 2 001

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
 Pembina TK.I
 NIP.19620810 199203 1 009

Lampiran 2

Foto Copy Rekening Koran

Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Jalan WR. Supratman no 13 Telp. (0342) 806135 , Fax (0342) 808478
Email bkd @ blitar kab.go.id

BLITAR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Duabelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si

NIP : 19620810 199203 1 009

Jabatan : Pengguna Barang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : FITRIA ANITAMA, S.Sos

NIP : 19840701 200212 2 003

Jabatan : Bendahara Barang

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/20/409.012/KPTS/2012 tanggal 17 Februari 2012 ditugaskan mengurus barang, berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2012:

No	Nama Persediaan	Nilai (Rp.)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 480.000
2.	Persediaan Materai	Rp. 18.000

Rincian hasil pemeriksaan fisik persediaan terlampir.

Yang diperiksa,
Bendahara Barang

Blitar, 31 Desember 2012
Yang memeriksa,
Pengguna Barang

FITRIA ANITAMA, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19840701 200212 2 003

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina TK.I
NIP.19620810 199203 1 009

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Persediaan Barang Habis Pakai

Per 31 Desember 2012

Daftar Persediaan Barang Habis Pakai Per 31 Desember 2012

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6

1	Persediaan Alat Tulis kantor				
	Persediaan Alat Tulis Kantor	12 rim	Rp. 40.000,00	Rp. 480.000,00	KERTAS HVS
2	Persediaan Benda Pos				
	Persediaan Materai	6 buah	Rp. 3000,00	Rp. 18.000,00	Materai 3000-an

Yang diperiksa,
Bendahara Barang

FITRIA ANITAMA, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19840701 200212 2 003

Blitar, 31 Desember 2012
Yang memeriksa,
Pengguna Barang

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina TK.I
NIP.19620810 199203 1 009

Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2011

Lain-lain:

- Memo Jurnal Penyesuaian/koreksi

- Bukti Penyesuaian/koreksi

Lampiran 6

Laporan Aset Daerah Extra Komtabel

